

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN STUDI

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kejahatan suatu daerah di Jawa pada tahun 2007 dapat dijelaskan melalui model ekonomi dengan metode *ordered logit model*. Pada model tersebut, terdapat lima variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan yaitu tipe daerah perkotaan atau bukan, tingkat upah rata-rata, tingkat pengangguran, proporsi pria usia 15-29 di populasi, dan kekuatan kepolisian tingkat resor.

Seperti yang telah diuraikan pada bab III, penawaran kejahatan adalah jumlah aksi kejahatan yang akan dilakukan pada tingkat *loot* tertentu, berslope positif menandakan bahwa semakin besar *loot* maka akan semakin besar pula aksi kejahatan yang terancam untuk dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penawaran kejahatan yaitu: ekspektasi *loot* per aksi kejahatan, biaya langsung untuk memperoleh harta rampasan, tingkat upah sektor legal, peluang tertangkap dan dipenjara, prospek lama dipenjara, dan selera individu dalam melakukan penawaran kejahatan.

Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran adalah: perubahan demografi (kenaikan/penurunan proporsi usia muda), kesempatan kerja yang berkurang/bertambah pada tingkat upah tertentu, dan perubahan kebijakan pemenjaraan. Sedangkan permintaan kejahatan merupakan jumlah aksi kejahatan yang akan dibiarkan pada tingkat *loot* tertentu, terdiri dari dua komponen: permintaan langsung terhadap harta rampasan kejahatan dan permintaan tidak langsung yang berasal dari *inverse demand* terhadap proteksi dan asuransi yang berhubungan negatif terhadap harta rampasan kejahatan.

Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa dari kelima variabel yang dinyatakan signifikan pada penelitian ini, empat diantaranya adalah variabel yang

mempengaruhi tingkat kejahatan dari sisi penawaran kejahatan. Sisanya, kekuatan kepolisian, adalah variabel yang mempengaruhi kejahatan dari sisi permintaan.

Daerah tipe perkotaan merupakan faktor spasial yang mempengaruhi tingkat kejahatan dari sisi penawaran. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk daerah perkotaan memberikan ekspektasi harta rampasan yang lebih besar dengan biaya kejahatan gagal yang lebih kecil.

Sementara dua variabel lainnya, upah rata-rata dan tingkat pengangguran, mempengaruhi penawaran kejahatan dengan arah yang berbeda. Kedua variabel tersebut mempengaruhi ekspektasi harta rampasan relatif daripada utilitas pendapatan legal. Kenaikan atau penurunan upah rata-rata akan membuat besaran ekspektasi harta rampasan terhadap utilitas pendapatan legal berubah. Di mana kenaikan upah akan menyebabkan ekspektasi harta rampasan terhadap utilitas pendapatan legal mengecil, dan sebaliknya. Hal yang sama terjadi pada tingkat pengangguran meski dengan arah pengaruh yang berbeda. Biaya dipenjara (yang mempengaruhi ekspektasi harta rampasan) juga dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut melalui arah yang berbeda.

Proporsi pria usia 15-29 tahun merupakan variabel yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran kejahatan. Penambahan proporsi pria usia 15-29 tahun pada populasi dapat dianalogikan dengan bertambahnya perusahaan pada suatu pasar sehingga menggeser kurva penawaran suatu barang/jasa ke kanan. Bertambahnya proporsi pria usia 15-29 tahun (yang merupakan usia produktif di mana fisik pada kondisi prima) merupakan penambahan “potensial perusahaan pemasok kejahatan” pada populasi sehingga menyebabkan kurva penawaran kejahatan bergeser ke kanan. Kekuatan kepolisian sendiri, seperti yang telah dijelaskan, merupakan sebuah bentuk intervensi pemerintah terhadap permintaan kejahatan di suatu daerah. Kekuatan kepolisian di penelitian ini berpengaruh signifikan karena polisi dapat menunaikan tugasnya, memberikan proteksi terhadap harta rampasan, di suatu daerah.

Dari kelima variabel yang dinyatakan signifikan, semua variabel memiliki arah pengaruh yang sesuai dengan teori ekonomi kejahatan yang mendasari dimasukkannya kelima variabel tersebut dalam model. Meskipun begitu, dua variabel

dalam model ternyata tidak signifikan yaitu tingkat kemiskinan dan proporsi keluarga *single mother* di sebuah daerah. Meningkatnya tingkat kemiskinan diperkirakan mengurangi insentif berupa harta rampasan, sementara untuk variabel *single mother* diduga terdapat masalah berupa kurang baiknya data yang belum mencerminkan profil keluarga *single mother* yang membesarkan anak bermasalah. Selain itu, tidak signifikannya kedua variabel tersebut diduga disebabkan oleh faktor budaya, di mana pelaku kejahatan dari daerah miskin cenderung melakukan kejahatan di luar daerah asal, dan keluarga besar berperan dalam mendidik anak *single mother*.

5.2. Saran

Dari kelima variabel independen yang dinyatakan signifikan dan satu variabel yang tidak signifikan, penulis membaginya ke dalam dua kelompok. Pertama, variabel yang dalam jangka pendek dan menengah sulit untuk diubah. Termasuk di dalamnya adalah tipe daerah perkotaan dan proporsi pria usia 15-29 tahun. Kedua, variabel ekonomi yang, paling tidak, dalam jangka menengah dapat diubah dan sering menjadi tujuan kebijakan ekonomi di suatu daerah termasuk di dalamnya adalah upah merata, pengangguran, dan kemiskinan.

Masyarakat suatu daerah selalu berusaha untuk mencapai tingkat kemiskinan dan pengangguran yang rendah dengan tingkat upah yang tinggi. Namun, seperti yang dapat dilihat dari hasil penelitian, variabel kemiskinan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan. Oleh karenanya, apabila publik suatu daerah memiliki perhatian yang tinggi dan berkeinginan mengurangi tingkat kejahatan properti maka daerah tersebut sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada tingkat pengangguran dan upah rata-ratanya dibandingkan masalah kemiskinan.

Dengan kata lain, apabila terdapat kondisi sedemikian rupa yang menyebabkan publik harus memilih antara kemiskinan yang rendah, upah rata-rata yang tinggi, atau pengangguran yang rendah maka target kemiskinan yang rendah mungkin harus dikorbankan, meskipun hal ini harus dikaji lebih lanjut karena terdapat irisan yang luas antara pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, besaran

odds ratio pengangguran dan upah rata-rata dalam mempengaruhi tingkat kejahatan sebaiknya diperhatikan untuk mencapai tingkat kejahatan yang lebih rendah dengan cara yang lebih efisien.

Kaitannya dengan daerah perkotaan dan proporsi pria usia 15-29 tahun, penulis menganggap bahwa tidak banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengubah variabel tersebut untuk mempengaruhi tingkat kejahatan. Namun demikian, publik suatu daerah hendaknya memberikan perhatian kepada kedua variabel tersebut. Suatu daerah tipe perkotaan dengan proporsi pria usia 15-29 tahun yang tinggi sebaiknya melakukan langkah khusus untuk menanggulangi ancaman tingginya kejahatan properti di daerah tersebut. Kebijakan yang diambil dapat dengan meningkatkan kekuatan kepolisian sehingga mempengaruhi permintaan kejahatan. Atau, melalui penawaran kejahatan dengan mempengaruhi variabel upah dan pengangguran. Selain itu, kebijakan khusus untuk pria usia 15-29 tahun hendaknya dikembangkan untuk mencegah kelompok pria usia tersebut menjadi pelaku kejahatan.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Idealnya, data yang digunakan adalah kejahatan properti per kapita yaitu total kejahatan properti per total penduduk. Data tingkat kejahatan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kelemahan. Karena desain kuesioner Susenas 2007, data kejahatan ini mengasumsikan tiap sampel-korban hanya mengalami sekali kejahatan dalam setahun. Padahal, korban kejahatan dapat mengalami tindak kejahatan properti lebih dari sekali dalam setahun. Meskipun begitu, untuk kejahatan properti, data Susenas tersebut merupakan pendekatan terbaik dibandingkan data laporan ke polisi yang sangat *undervalue*. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data IFLS (Indonesia Family Life Survey) terbaru (belum dipublikasikan saat penelitian ini dibuat) yang mencantumkan keterangan kejahatan lebih lengkap.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daerah tingkat kabupaten/kota di Jawa. Padahal, analisis ekonomi kejahatan umumnya digunakan dalam konteks perkotaan. Penelitian dengan menggunakan data kota-kota di Jawa atau Indonesia memungkinkan hasil yang lebih representatif bagi analisis ekonomi kejahatan.
3. Data yang digunakan untuk variabel *single mother* belum mampu menggambarkan profil keluarga *single mother* yang bermasalah dalam membesarkan anak. Meskipun hasil pengujian ekonometri menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara keluarga *single mother* dengan tingkat kejahatan, hasil yang berbeda mungkin akan didapatkan apabila digunakan data yang lebih representatif. Sayangnya, pencarian literatur oleh penulis belum mampu mendapatkan profil keluarga *single mother* bermasalah tersebut. Hal ini menyulitkan penulis untuk mengaplikasikannya dalam bentuk data.
4. Data untuk variabel upah rata-rata masih menggunakan upah rata-rata secara umum. Padahal, kebijakan dan usaha untuk menurunkan tindak kejahatan properti melalui peningkatan upah rata-rata, akan lebih efektif dan murah apabila diarahkan secara spesifik ke sektor pekerja tertentu yang rentan melakukan tindak kejahatan.
5. Penelitian ini mengabaikan efek narkoba terhadap keputusan pelaku dalam melakukan tindak kejahatan. Padahal, dalam banyak kasus empiris, kasus kejahatan yang tinggi disebabkan peredaran narkoba yang tinggi di suatu daerah. Dibutuhkan referensi dan tinjauan literatur lebih luas mengenai keputusan pecandu narkoba berpengaruh dalam pembuatan keputusan tindak kejahatan.